

**POLITIK KELUARGA DAN POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2020**

Khanifatul Mukaromah¹, Laila Kholid Alfirdaus², Fitriyah³

Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Diponegoro Semarang

Email: kbanifatul12@gmail.com

Received: 21 Maret 2022 | Revised: 1 Juni 2022 | Accepted: 2 Juni 2022

Abstract: The strong grip of the oligarchs causes the recruitment of political parties to not work properly, there is a tendency for candidates to be nominated by political parties based on political elites not through a democratic mechanism that considers the integrity and capability of the candidate. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data obtained then went through the stages of selecting data, data clarification, and compiling data. The findings of this study indicate that the pattern of recruitment of political parties (PDIP) is carried out openly, but through consideration of the existence of the family. In addition, the existence of Anas provides a great advantage in influencing the support of political parties. The research result shows that (1) the pattern of PDIP recruitment for Ipuk Fiestiandani is carried out openly according to applicable laws and regulations, but beyond that the existence of incumbent figures and popularity will always be nominated, and become the main attraction of PDIP in carrying Ipuk in the Banyuwangi Regency Election, (2) the Ipuk carrier is still affiliated with the existence of Anas behind it.

Keywords: family politics; regional head recruitment; pilkada; banyuwangi

Abstrak: Kuatnya cengkraman oligarki menyebabkan mekanisme rekrutmen partai politik tidak berjalan semestinya, terdapat kecenderungan pencalonan kandidat berdasarkan elit politik bukan melalui mekanisme demokratis yang mempertimbangkan integritas dan kapabilitas kandidat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian melalui tahapan menyeleksi data, klarifikasi data, dan menyusun data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen partai politik (PDIP) dilakukan secara terbuka, namun melalui pertimbangan eksistensi keluarga. Selain itu keberadaan Anas memberikan keuntungan besar dalam mempengaruhi dukungan partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola rekrutmen PDIP terhadap Ipuk Fiestiandani dilakukan secara terbuka sesuai peruntutan dan aturan yang berlaku, namun di luar itu keberadaan figur petahana dan popularitas selalu dinominasikan, dan menjadi daya tarik PDIP dalam mengusung Ipuk di Pilkada Kabupaten Banyuwangi, (2) pengusungan Ipuk masih terafiliasi dengan keberadaan anas di belakangnya.

Kata Kunci: politik keluarga; rekrutmen kepala daerah; pilkada; banyuwangi

PENDAHULUAN

Rekrutmen politik dimaknai sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Haryanto, 1984). Melalui Peraturan Pemerintah RI (2011) Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi rekrutmen sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Upaya ini tidak terlepas dari peran partai politik yang dianggap mampu menyediakan kader-kader terbaiknya untuk diusung dalam kontestasi. Partai politik biasanya menggalang kader ketika menghadapi Pemilu maupun Pilkada (Kartini, 2017). Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi awal permulaan yang penting di mana hal ini meliputi proses pengkaderan anggota maupun promosi elit politik yang baru. Menurut Budiardjo (2008), salah satu fungsi partai politik dalam negara demokratis ialah melaksanakan rekrutmen politik. Artinya partai politik sebagai sarana rekrutmen untuk pencalonan yang berfungsi untuk mencari sekaligus mengajak orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik (Surbakti, 1992). Di satu sisi terdapat keuntungan tertentu dengan mekanisme politik seperti ini. Partai politik akan menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk menjadi media mengembangkan karir politik seseorang. Seorang politisi akan terasah secara matang visi dan misinya dalam partai politik. Parpol akan menggembleng kadernya menuju puncak tangga politik untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Terutama karena di sini parpol adalah lembaga yang ditunjuk sistem demokrasi sebagai media penyalur aspirasi rakyat terhadap negara, maka parpol akan lebih besar perannya dalam membantu rakyat (Habbodin, 2009).

Namun fungsi rekrutmen untuk pencalonan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh partai politik demi menciptakan pola rekrutmen yang demokratis dan dilakukan secara terbuka sebagai kendaraan politik masyarakat yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu. Pada level daerah misalnya, dalam praktiknya model rekrutmen seperti ini sulit mengharap partai politik dapat mengakomodir figur-figur potensial masyarakat, apalagi jika tidak memiliki modal sosial dan kapital yang cukup. Seleksi kandidat kepala daerah merupakan salah satu tahapan paling penting dalam Pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak serentak. Pengambilan keputusan dalam internal partai politik sangat menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Pemilihan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada sering kali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para calon pemilih yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilaksanakan oleh internal partai (Witianti & Hendra, 2019).

Selain itu, kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki oleh ketua umum partai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partai politik di tingkat lokal gagal menghadirkan pencalonan melalui mekanisme yang demokratis untuk berkompetisi dalam perhelatan Pilkada. Bahkan tidak jarang hak politik formal DPP partai dalam memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon pada pilkada sering memotong usulan dari struktur partai di tingkat bawah tentang sosok yang akan diusung, sehingga baik DPC maupun DPD menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan DPP, dan mereka diharuskan siap dan patuh terhadap keputusan yang sudah diambil. Secara fungsi, partai politik sudah melaksanakan fungsinya dengan menjalankan kaderisasi untuk memilih pemimpin terbaiknya, namun yang

perlu digarisbawahi adalah proses perekrutan ini justru menggunakan pertimbangan pragmatis, di mana memanfaatkan figur yang sudah dikenal masyarakat dan elektabilitas calon yang akan diusungnya.

Upaya partai politik untuk mengusung kandidatnya melalui pilkada menunjukkan kekuatan dominasi elit yang tidak bisa dibendung. Dengan demikian hal ini menunjukkan hadirnya kepemilikan kekuasaan yang besar berpengaruh dalam menentukan aspek sumber daya, inilah yang sering disebut sebagai para oligark (Nge, 2018). Bagi Winters (2011), oligarki tidak hanya sekedar elit minoritas yang berkuasa ataupun bentuk pemerintahan, melainkan para pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Seiring berjalannya waktu adanya desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi oligarki untuk dapat berkembang pada tingkat lokal. Para oligark ini bertransformasi menyesuaikan karakteristik pemerintahan yang demokrasi, untuk dapat bertahan dan mengakar kuat dalam sistem perpolitikan di Indonesia.

Dalam perhelatan pilkada para oligark mempertahankan kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting dalam birokrasi maupun dalam internal partai politik, dengan begitu akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik serta pembentukan elektabilitasnya. Seperti halnya petahana yang awalnya memiliki ranah kemudian berubah menjadi relasi dan interaksi yang kemudian dapat mengarahkan strateginya dalam menarik massa, dengan demikian petahana juga bermaksud mengamankan posisi kekuasaan dengan mendorong kerabat dan atau lingkungan keluarganya dalam menjalankan jabatan politiknya. Dengan kata lain petahana sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam perhelatan pilkada, tetapi estafet penggantinya adalah bagian dirinya. Sebagai penguasa, *track record* dari keluarga petahana akan mudah dilihat, terlebih jika memiliki *track record* yang baik dimata masyarakat, akan pengaruh besar dalam pencalonan kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua itu perlu dibangun pencitraan tentang capaian kinerja yang baik di tengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut.

Pragmatisme politik melalui proses perekrutan partai politik seringkali hanya mengedepankan popularitas dan elektabilitas, terlebih jika kandidat memiliki kekuatan di daerah dengan basis massa yang kuat maka akan mudah dalam perekrutan partai politik. Dengan begitu, kader partai yang jumlahnya tidak sedikit yang dianggap mampu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, hal ini karena dikalahkan oleh figur populer ataupun calon yang memiliki elektabilitas tinggi untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Keberhasilan para kepala daerah dalam mentransfer estafet kekuasaan kepada pasangannya, anak atau menantu, dan adik atau kakak merupakan strategi baru dalam mempertahankan dan melestarikan kekuasaan keluarga dalam pengelolaan pemerintahan, baik tingkat daerah atau nasional. Padahal dalam hal ini filter paling utama dalam menjaring calon-calon dan kader yang berkualitas adalah dari partai politik itu sendiri, kajian ini menjadi sangat penting dikarenakan perilaku tersebut akan membuka peluang dalam pembentukan oligarki politik.

Studi lain yang sudah dilakukan tentang rekrutmen partai politik seperti penelitian mencegah terjadinya dinasti politik melalui pola rekrutmen partai politik pada Pilkada Solo Tahun 2020 (Nika, 2021) penelitian ini menunjukkan mencegah dinasti politik melalui pola rekrutmen politik. Berikutnya, penelitian partai politik, rekrutmen politik dan pembentukan

dinasti politik dalam pilkada yang menunjukkan bahwa rekrutmen politik dalam pilkada meski terkesan terbuka tetapi proses seleksinya bersifat eksklusif dengan menambahkan syarat popularitas dan elektabilitas calon. Selain itu penelitian yang berjudul implikasi sistemik dari rekrutmen dari kepala daerah oleh partai politik (Adelia, 2020) yang menunjukkan dampak dari rekrutmen partai politik yang tidak menerapkan kebijakan rekrutmen yang baik sehingga muncul beberapa implikasi rekrutmen partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Fokus studi-studi tersebut mengarah pada indikasi pola rekrutmen politik yang tidak, demokratis, partai politik lebih memilih pertimbangan lain daripada kualitas dan kapabilitas seperti nilai finansial dan popularitas. Hal ini dikarenakan partai politik ingin mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan.

Namun dalam studi ini secara khusus menyoroti proses pencalonan Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dan sosok Abdullah Azwar Anas di belakangnya. Ipuk Fiestiandani merupakan istri Bupati Abdullah Azwar Anas, bupati dua periode, yang selama berkuasa berhasil mempopulerkan Kabupaten Banyuwangi melalui gerakan inovatifnya. Bupati Anas juga merupakan Kader dari PDIP. Pencalonan Ipuk menarik untuk dikaji untuk menjelaskan fenomena politik keluarga dalam rekrutmen partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, mengingat Ipuk masih terafiliasi hubungan keluarga melalui status perkawinan dengan Bupati Anas. Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui pola rekrutmen partai politik dalam mengukung Ipuk-Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Kedua* untuk mengetahui bagaimana peran anas dalam pencalonan Ipuk oleh Partai Politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (Noor, 2011) penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan studi riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan yang induktif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat *aktual* sebagaimana adanya pada saat penelitian yang berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini memfokuskan dua hal yakni pola rekrutmen partai politik dalam pencalonan Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, dan apakah pencalonan Ipuk Fiestiandani dideterminasi oleh figure Abdullah Azwar Anas. Informan dari penelitian ini adalah partai pengukung Ipuk Fiestiandani yaitu PDIP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik sampel purposive, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan tahapan menyeleksi data, klarifikasi data, dan menyusun data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses peralihan kepemimpinan merupakan hal yang sangat krusial, pasalnya keseluruhan penyelenggaraan pilkada harus terkoneksi dengan dukungan dan kepentingan,

termasuk dalam hal perekrutan oleh partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Indonesia berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut pengertian umumnya, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil (Budiardjo, 2008).

Menurut Sahid (2011) ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya perekrutan kader politik yang berkualitas untuk dipersiapkan pada masa yang akan datang. *Pertama* ialah rekrutmen kader. Cara ini merupakan tahap awal dari penentuan calon kader melalui seleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh partai politik. *Kedua* ialah pendidikan dan pelatihan kader dasar. upaya ini harus ditempuh oleh partai politik guna untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas di masa yang akan datang. *Ketiga* ialah penugasan. Hal ini berguna untuk melatih, dan menguji kader dengan pengalaman langsung. *Keempat* ialah pendidikan kader tingkat lanjut. Hal ini digunakan oleh partai politik setelah melihat kader yang bersangkutan menjalani proses penugasan. *Kelima* ialah kepeloporan. Cara ini menempatkan kader sebagai pelopor yang berfungsi memajemen partai dan mencegah perpecahan di partai. *Keenam* ialah pelibatan. Kader secara langsung dilibatkan dalam acara-acara besar di luar maupun di dalam partai. Ini berguna untuk menguji kemampuan seorang kader dalam menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan.

Ada beberapa pertimbangan dijelaskan oleh Habbodin (2009) kandidat lebih cenderung dipilih partai *Pertama*, partai mengalami kekosongan kader yang memiliki popularitas dan kualitas yang seimbang dengan kandidat. *Kedua*, partai gagal melakukan kaderisasi, sehingga kebanyakan kader tidak laku dijual dalam Pilkada. *Ketiga*, kader gagal mengintegrasikan nilai-nilai partai kedalam dirinya, sehingga partai tidak bisa membedakan antara keunikan kadernya dengan kandidat yang bukan berasal dari partai politiknya.

Seperti halnya yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, Ipuk Fiestiandani yang berpasangan dengan Sugirah tampil sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut dua. Pencalonan Ipuk berpasangan dengan Sugirah yang berasal dari partai PDIP sekaligus anggota DPRD yang terpilih dalam tiga periode, pasangan ini diusung oleh PDIP berkoalisi dengan Partai Hanura, PPP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra dan didukung oleh lima partai non parlemen yaitu PAN, PSI, Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Keberadaan status Ipuk sebagai istri Abdullah Azwar Anas menjadi perbincangan yang hangat, Abdullah Azwar Anas atau sering dikenal dengan Anas adalah bupati yang sedang berkuasa saat pilkada, semasa ia berkuasa berhasil mempopulerkan daerahnya dalam kancah nasional maupun internasional. Beberapa prestasi telah dilakukan anas demi mengubah wajah Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai potensinya seperti yang dijelaskan diatas. Oleh karena itu, kepopuleran anas sudah tidak bisa diragukan lagi di mata masyarakat melalui pencapaian anas yang dianggap berhasil di Kabupaten Banyuwangi.

Berangkat dari hal diatas, perhatian utamanya yaitu pada proses perekrutan yang dilakukan partai PDIP terhadap Ipuk, pasalnya Ipuk sebelumnya bukanlah kader dari partai manapun dan tidak mempunyai jejak dalam politik, namun pada saat pilkada secara langsung

Ipuk-Sugirah diusung oleh PDIP, problema ini muncul ketika lawan Ipuk yaitu Yusuf Widyatmoko yang merupakan petahana Wakil Bupati, dua periode mendampingi Anas, adalah sekaligus kader dari PDIP. Namun ia justru tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP, sehingga pada akhirnya Yusuf mendapatkan pinangan dari beberapa partai lain yaitu PKB, Golkar, PKS, dan Demokrat. Fenomena gagalnya kader dalam memperoleh rekomendasi ditambah lagi sesungguhnya Yusuf memiliki modalitas sebagai Wakil Bupati tahun sebelumnya kemudian memunculkan pertanyaan apa yang melatarbelakangi PDIP justru memberikan rekomendasi kepada Ipuk.

Refleksi hasil penelitian ini adalah keberadaan nama besar keluarga (Anas) memberikan keuntungan secara instan oleh Ipuk dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. Keuntungan yang diperoleh terdiri dari dukungan partai politik maupun dukungan dari masyarakat, melalui hasil kinerja anas selama sepuluh tahun terakhir memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dukungan yang muncul kepada Ipuk. Salah satunya dari partai pengusungnya yaitu PDIP, melalui mekanisme secara terbuka dan melalui beberapa tahapan menjadi salah satu cara untuk menutupi strategi permainan politik, justru yang terjadi adalah PDIP lebih mementingkan popularitas dan nama besar keluarga dalam panggung politik. Hal ini tentu dikarenakan partai politik masih menganggap nama besar anas efektif untuk dijadikan strategi dalam meraih suara pemilih.

Proses Rekrutmen Ipuk Fiestiandani

Dalam konteks rekrutmen politik tersebut, partai politik dapat melakukan proses rekrutmen melalui proses rekrutmen terbuka atau juga melalui proses rekrutmen tertutup. Jika menggunakan rekrutmen terbuka, maka syaratnya harus menampilkan seorang tokoh yang dapat diketahui kinerjanya secara luas oleh publik. Dalam hal ini partai politik harus menyuguhkan calon yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat (Putra (2003). Proses rekrutmen secara terbuka dinilai yang paling kompetitif dimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan melihat dan menilai kemampuan elit. Adapun perekrutan yang dilakukan secara tertutup merupakan praktik perekrutan syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri, cara ini dinilai sangat tidak kompetitif dikarenakan menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Hal ini juga menyebabkan tertutup akses public sehingga berlawanan dengan prinsip demokrasi, bahkan melalui cara seperti ini juga akan berkontribusi dalam pembentukan dinasti politik.

Penentuan calon Kepala Daerah oleh partai PDIP DPC Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penjaringan calon yang dibuka pada tanggal 05 – 14 September 2019, kemudian masuk pada tahap penyaringan dan penetapan pada tahap ini partai politik melakukan dua mekanisme penetapan yang *pertama* yakni analisis kelengkapan syarat-syarat pendaftaran, *kedua* survey elektabilitas dan popularitas kandidat ataupun keluarga kandidat dalam eksistensinya di pemerintahan yang dipandang senantiasa berperan dalam mengaktualisasikan program. Kemudian dilakukan rapat internal DPC PDIP (pengurus tingkat kabupaten) dan hasilnya diusulkan ke DPD (pengurus tingkat provinsi) dan DPP (pengurus tingkat pusat) untuk mendapatkan rekomendasi. Selepas itu, surat rekomendasi turun pada tanggal 02 Juli 2020, kemudian Ipuk dan Sugirah resmi mendaftar ke

KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 September 2020 didampingi jajaran partai pengusung. Berikut wawancara dengan I Made Cahyana Negara, Ketua Partai PDIP DPC Kabupaten Banyuwangi:

“.. Proses Pengusungan tentunya dimulai dari penjaringan PDIP dan melalui survey elektabilitas calon Kepala Daerah, ini kan sifatnya terbuka dari berbagai pintu mulai dari tingkatan Kabupaten atau daerah atau DPC kemudian tingkat Provinsi dan Pusat, namun diluar itupun rapat DPP bisa menentukan juga.”

Sejatinya setiap sistem politik memiliki prosedur yang berbeda dalam proses rekrutmen, seleksi calon juga dilakukan secara terpusat (tersentralisasi) yang peran pengurus partai politik pusat (DPP) sangat besar. Peran kuat dari DPP dalam pencalonan pilkada ini bahkan diformalkan mulai Pilkada 2015. Pasal 42 angka (4) (5) (6) UU Pilkada No. 8 tahun 2015 menegaskan bahwa dokumen pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU setempat harus disertai surat keputusan (SK) dari Pengurus Pusat Partai Politik (DPP) tentang persetujuan atas calon yang diusulkan (dinominasikan). Pada hampir semua partai politik rekomendasi ketua umum partai adalah kata akhir yang menentukan gagal-tidaknya seorang calon yang diusung oleh partai itu, sehingga berdampak calon yang diusulkan dari bawah terpotong di DPP. Faktor yang juga penting dalam seleksi calon adalah kemampuan finansial dan tingkat popularitas dan elektabilitas calon, hampir semua partai politik menyelenggarakan survei untuk mengukur derajat popularitas dan elektabilitas calon. Calon yang diusulkan dari bawah akan terpankas di DPP karena faktor popularitas dan elektabilitas yang rendah. Kondisi ini memberi karpet merah bagi calon berlatar belakang dinasti yang dari ukuran finansial, popularitas dan elektabilitas memenuhi syarat (Smith, 2018). Sehingga di era pemilihan saat ini popularitas dan elektabilitas memang menjadi bagian penting untuk terpilih menjadi kepala daerah.

Secara umum sistem kepartaian di daerah tidak akan terlepas dari eksistensi kepengurusan pusat, partai politik selalu mempunyai posisi dalam memainkan peran yang sangat strategis, seperti halnya dalam pengusungan bakal kandidat Kepala Daerah yang dimulai dari beberapa tahapan dan langkah-langkah yang dari penjaringan calon dengan beberapa tingkatan dimulai dari tingkatan bawah yaitu tingkat Ranting, DPC, kemudian DPW, namun diluar dari itu rapat di tingkat pusat juga bisa saja menentukan, artinya calon dapat secara langsung meminta restu pada DPP pusat untuk mendapatkan rekomendasi secara langsung, ataupun melalui survey elektabilitas yang dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa tahu masyarakat dengan calon yang diusung oleh partai tersebut dan bertujuan untuk memperkirakan berapa persen keterpilihan seseorang tokoh atau kandidat politik.

Dengan demikian, melalui kasus Kabupaten Banyuwangi diatas menunjukkan bahwa penentuan atau penetapan pengusungan IpuK dilakukan melalui sistem terbuka sesuai dengan prosedur dan beberapa tahapan, selain itu juga dilakukan survey elektabilitas kepada masyarakat untuk mengetahui elektabilitas IpuK di masyarakat, setelah hasil survey diperoleh maka partai PDIP melakukan rapat internal dan hasil dari rapat internal tersebut menghasilkan penetapan untuk pengusungan calon, namun PDIP juga tidak memungkiri jika keputusan DPP pusat jauh lebih memiliki andil dalam pengusungan. Dengan begitu hal ini juga akan memunculkan sebuah ketimpangan dimana akan memberikan akses dalam

memunculkan nama dalam lingkaran petahana dengan calon yang diajukan berdasarkan popularitas dan elektabilitas yang dimiliki oleh keluarga petahana akan dipastikan calon tersebut akan mengakumulasi wilayah dan memperoleh simpati kepada masyarakat. Serta menunjukkan bahwa kader lama yang kurang populer tidak memperoleh panggung walaupun ada, akan dimasukkan sebagai cadangan saja. Kurangnya penghargaan terhadap kader lama, sangat berpotensi menimbulkan runtuhnya kekuatan internal suatu partai politik, sehingga hal ini juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan partai politik, bahwa ternyata partai politik didominasi oleh elit semata dan proses rekrutmen hanya didasarkan pada kepemilikan popularitas, baik popularitas pribadi ataupun melalui lingkungan keluarga, ditambah lagi kinerja pemerintahan yang baik akan dalam hal ini bisa diterima oleh masyarakat terlebih memilih. Inilah yang menjadi salah satu modal kekuatan dari keluarga petahana bila dibandingkan dengan pasangan lain. Memang tidak selalu petahana terpilih lagi, begitu pun tidak selalu peluang menang itu bisa diwariskan kepada keluarganya (Smith, 2018).

Nama Besar Anas dalam Rekrutmen Ipuk

Nama besar Anas oleh partai politik masih dianggap menjadi penyumbang kekuatan suara yang besar melalui pencapaian-pencapaian dan prestasi di Kabupaten Banyuwangi selama menjabat sebagai bupati, selama menjabat sebagai bupati, Anas berhasil mengubah wajah Banyuwangi dengan berbagai inovasi. Di antaranya terpilih sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri serta kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia. Dengan demikian hal ini menunjukkan implikasi pencalonan Ipuk didasarkan pada bayang-bayang suaminya bahwa peran dari petahana (Anas) sedikit banyak akan menentukan. Sejalan dengan hal tersebut dalam proses pengusungan Ipuk Fiestiandani yang dalam penetapannya dinilai masih terafiliasi dengan figur Anas di belakangnya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik mengandalkan figur dan popularitas petahana. I Made Cahyana Negara, selaku Ketua Partai PDIP DPC Kabupaten Banyuwangi, menyatakan dalam wawancara:

“...Selalu ada keterkaitan ya, dilihat dari kepemimpinan Pak anas selama kurang lebih sepuluh tahun cukup bagus dan dipercaya oleh masyarakat, serta Pak anas kader PDIP dan Bu Ipuk pun juga kader PDIP juga, sehingga kita menginginkan sosok yang dapat meneruskan estafet kepemimpinan dan program-program yang sudah dibangun maupun program yang belum selesai untuk dilanjutkan kembali, secara terus terang kedekatan Bu Ipuk dengan pak anas ini kan lebih intens jadi akan mudah dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk belajar dan mengasah kemampuan Bu Ipuk dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi.”

Praktik pencalonan dalam konteks Pilkada Kabupaten Banyuwangi ini menyisakan polemik yang mendasar, cukup diakui Ipuk memperoleh keuntungan dalam bentuk popularitas dari suaminya tersebut, modal ini juga menjadi modal awal keterpilihan, di mana popularitas tersebut menjadi indikator penilaian partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung. Namun dalam hal proses perekrutan sempat menjadi tarik alur dan perdebatan public, pasalnya PDIP malah memberikan rekomendasi kepada Ipuk daripada Yusuf Widyatmoko selaku kader PDIP yang lebih dahulu dengan *track record* sebagai wakil bupati selama sepuluh tahun terakhir tidak menjadi jaminan mendapatkan rekomendasi. Hal ini

menunjukkan pada suatu konsentrasi bahwasanya, perekrutan calon kepala daerah dideterminasi oleh privilege melalui popularitas calon maupun popularitas lingkungan petahana sehingga masyarakat akan memandang dalam sisi *track record* kepemimpinan di berbagai organisasi dan di instansi pemerintahan yang dipimpin, selain itu figur dari seorang mantan bupati dinilai masih maksimal untuk menari masa. Dengan demikian, terjadi simbiosis mutualisme antara kandidat dan partai politik, di mana partai memperoleh keuntungan untuk mendapatkan kursi yang berasal dari keluarga politik, dan di satu sisi yang lain kandidat dari keluarga politik memperoleh peluang sebagai kendaraan untuk berkuasa. Ditambah lagi partai politik cenderung menitikberatkan pada aspek elektabilitas dalam menentukan kandidat berdasarkan nama besar keluarga yang dinilai cukup menentukan dalam memperoleh dukungan publik. Hal ini selaras dengan (Harjanto, 2011) bahwa untuk memenangi *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar parpol, juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Tentu hal ini berkaitan dengan ikatan kekerabatan dengan para *incumbent*, hal inilah yang membuat partai politik sering mendapatkan kritik public mengenai dalam perekrutan.

PENUTUP

Salah satu fungsi klasik dari partai politik adalah menyangkut peran partai dalam mencalonkan kandidat dalam jabatan tingkat pemerintahan, dengan begitu fungsi partai politik dalam pengusungan sangat penting dikarenakan partai politik diharuskan menyediakan kandidat yang memiliki kapabilitas. Pelaksanaan rekrutmen partai politik seringkali mengutamakan figur potensial yang dimiliki oleh kandidat seperti nama besar kandidat, serta nama besar keluarga kandidat yang berperan besar di daera tersebut. Figur yang memiliki potensi ini tidak harus berasal dari mereka yang memiliki latar belakang sebagai kader internal partai politik itu sendiri, tetapi juga dari kalangan eksternal partai. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian partai politik akan mudah jatuh untuk mendukung siapapun yang dinominasikan oleh para petahana bahkan jika kandidat tersebut adalah istri, anak, ibu, atau kerabat lainnya. Pengaruh petahana ini besar, bahkan ketika misalnya mereka memiliki pengaruh yang besar di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen partai PDIP dalam pengusungan Ipuk Fiestiandani di Pilkada Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terbuka dengan beberapa mekanisme peruntutan usulan yang dimulai dari DPC, DPW hingga DPP. Namun diluar dari proses itu pengusungan bakal calon juga bisa menentukan seperti rapat internal partai ataupun penetapan langsung oleh DPP. Selain itu dalam penetapannya juga dilakukan dengan survey elektabilitas kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa besar masyarakat tahu tentang Ipuk, hal ini dikarenakan elektabilitas erat kaitannya dengan popularitas, maka seorang yang populer memiliki elektabilitas yang tinggi. Kepopuleran Ipuk juga didukung dengan figur anas dan sebagai Istri bupati yang menjabat dua periode nampaknya memberikan peluang Ipuk untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini proses pengusungan Ipuk dinilai masih terafiliasi dengan figur anas di belakangnya, nama besar anas oleh partai politik menjadi indikator penilaian dalam pengusungan Ipuk sebagai calon Kepala Daerah. Secara proses rekrutmen politik dijalankan oleh partai politik

calon yang berasal dari keluarga tersebut yang dinominasikan daripada mengutamakan kader lama. Selain itu, nama anas oleh partai politik juga dinilai mampu menyumbang besarnya suara di Kabupaten Banyuwangi hal ini dikarenakan figur anas oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi sudah sangat dikenal dan elektabilitas yang diciptakan juga sangat baik.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik dalam pengusungan kandidat seringkali mengutamakan seorang yang sudah populer di kalangan tertentu yang kemudian dihubungkan dengan jabatan yang dipegang. Kepopuleran pada seorang figur sering dikaitkan dengan apa yang telah dia lakukan semasa menjabat. Mengingat fungsi dari partai politik yang begitu penting seiring dengan keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran yang mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Melalui fenomena diatas tentu akan sangat membahayakan iklim demokrasi kedepan dikarenakan politik kekerabatan telah banyak memberikan kemudahan bagi kualitas demokrasi elektoral, terutama dalam proses kandidasi dan rekrutmen politik. Penelitian ini memiliki kelebihan dengan melihat sisi lain dari pola rekrutmen partai politik yang mengutamakan nama besar keluarga dan popularitas keluarga. Hal ini dinilai cukup untuk memperoleh dukungan, serta melanjutkan kuasa politik keluarga. Mengacu pada kesimpulan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut : rekrutmen partai politik diharapkan mampu memperbesar calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin yang tidak hanya mengandalkan nama besar keluarga dibelakangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. (2020). Implikasi Sistemik Dari Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Politik. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(1), 33–48.
- Fadilah Putra. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik : Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Habbodin, G. S. dan M. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. IPD.
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138–159.
- Haryanto. (1984). *Partai politik : suatu tinjauan umum*. Liberty.
- Herri Jenius Nge. (2018). *Oligarki, Rekrument Politik, Partai Politik, Demokrasi Lokal*. 1, 59–84.
- Juliansyah Noor. (2011). Metodologi penelitian : skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. In *Kencana Prenada Media Group* (Vol. 1, Issue 69). Kencana Prenada Media Group.
- Kartini, D. S. (2017). Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Gerindra. *CosmoGov*, 1(1), 105. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11802>
- Komarudin Sahid. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nika, I. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020). *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 562–577.
- Nge, H. J. (2018). *Oligarki, Rekrument Politik, Partai Politik, Demokrasi Lokal*. 1, 59–84.
- Smith, J. H. & D. (2018). Political Dynasties and The Incumbency Advantage in Party-Centered Environments. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 706–712. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.*
- Winters, J. A. (2011). Oligarki. In ... *Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan* Gramedia Pustaka Utama.
- Witianti, S., & Hendra. (2019). The Role of Political Party Chairman in the Nomination of Head. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 55–67.